	13. Media atau metode apa yang digunakan agar pendidikan pemilih mudah dipahami penyandang disabilitas? 14. Bagaimana media atau metode tersebut digunakan dan disesuaikan? 15. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas? 16. Bagaimana bentuk kerja sama antara KPU DIY dengan organisasi atau komunitas disabilitas? 17. Apakah KPU DIY melaksanakan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas secara berkelanjutan? 18. Kapan saja kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas dilakukan? 19. Apa upaya KPU DIY agar pendidikan pemilih selalu berjalan?

Lampiran 3. Hasil Observasi

OBSERVASI KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang Diamati	Hasil Observasi
1	Senin, 17 November 2025	09.00 – 12.00WIB	*Workshop* Tahap I	Peneliti mengamati peserta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam tahapan pemilu. Diskusi berlangsung interaktif dengan pendampingan dari KPU.
2	Senin, 24 November 2025	09.00 – 12.00WIB	*Workshop* Tahap II	Peneliti mengamati peserta mendiskusikan solusi atas berbagai hambatan yang telah diidentifikasi pada *workshop* sebelumnya. Peserta menyampaikan usulan terkait aksesibilitas informasi, pelayanan di TPS, dan peningkatan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pemilu.
3	Senin, 01 Desember 2025	09.00 – 12.00WIB	*Workshop* Tahap II	Peneliti mengamati proses penyusunan *Roadmap* Partisipasi Disabilitas Menuju Pemilu 2029. KPU DIY dan organisasi penyandang disabilitas secara bersama-sama merumuskan rekomendasi yang akan menjadi pedoman peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas.

Lampiran 4. Transkrip Wawancara Informan

A. WAWANCARA INFORMAN 1

Hari, Tanggal: Senin, 26 Mei 2026

Informasi Informan

Nama : Sri Surani

Jabatan :Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY

Lama Bekerja : 3 Tahun menjabat posisi sekarang

Peran Dalam Program

Pendidikan Pemilih : Pemantik

Waila: Sebelumnya perkenalkan nama saya Waila Sofia, saya dari Prodi Sosiologi UAJY. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait penelitian yang akan saya lakukan, terkait dengan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas. Mungkin bisa memperkenalkan dulu nama, usia, jabatan, lama bekerja, sama peran di program pendidikan pemilih.

Rani: Saya Rani. Saya di KPU DIY sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Jadi bertanggung jawab dalam hal mendesain, melaksanakan, memastikan pendidikan pemilih itu terjadi di DIY, kemudian juga sosialisasi sampai ke masyarakat, termasuk bagaimana memastikan media kami, media sosial itu juga bisa mempublikasikan apa yang kita lakukan. Kalau di KPU itu ada dua rumpun, satu rumpun komisioner, satu sekretariat teman-teman ASN. Kalau saya itu di rumpun komisioner. Kami berlima di KPU DIY. Jabatan kami selama lima tahun.

Waila: Saya baca di buku Panduan Pendidikan Pemilih tahun 2015 itu, pendidikan pemilih berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi dan juga kepemiluan. Nilai-nilai demokrasi itu apa saja yang disampaikan kepada penyandang disabilitas?

Rani: Jadi fokusnya di pemilih disabilitas ya. Ketugasan KPU itu melakukan proses pendidikan kepada seluruh pemilih. Pemilih itu ada sembilan segmen. Salah satu segmennya adalah kelompok minoritas, termasuk disabilitas. Sebelum sampai ke pendidikan pemilih, KPU punya desain untuk memastikan pelaksanaan mandat undang-undang terkait layanan disabilitas atau memastikan hak-hak disabilitas dalam proses demokrasi. Kita punya yang namanya pemilu inklusif. Pemilu inklusif itu memastikan seluruh pemilih disabilitas dengan semua ragamnya mendapatkan hak. Tidak hanya disabilitas sebenarnya, tapi seluruh pemilih termasuk kelompok minoritas lain seperti waria, anak jalanan, dan kelompok lain. Pemilu harus bisa dinikmati dan diakses semua kelompok tanpa terkecuali.

Waila: Apa saja kebijakan yang dilakukan KPU untuk memastikan itu?

Rani: Tentu dimulai dari pendataan pemilih. Proses pendidikan pemilih itu tidak bisa ujug-ujug, tetapi harus dimulai dari hak dasar dulu, yaitu pendataan pemilih. Karena ketika seseorang tidak masuk daftar pemilih, maka dia tidak mendapatkan layanan lainnya. Maka upaya yang dilakukan KPU adalah memastikan mereka masuk daftar pemilih. Mulai Pemilu 2024 sudah ada data pilah pemilih disabilitas berdasarkan ragam disabilitasnya. Itu kemajuan. DPT 2024 sudah ada data pilah pemilih disabilitas sesuai Undang-Undang Disabilitas. Nah itu berpengaruh ke langkah berikutnya. Ketika sudah masuk daftar pemilih, maka KPU harus memastikan mereka terpapar seluruh tahapan informasi soal kepemiluan.Tahapan pemilu mulai dari pendataan, peserta pemilu, kesadaran kenapa disabilitas harus menggunakan hak pilih, itu semua harus disampaikan kepada kelompok disabilitas.

Waila: Sejauh ini KPU sudah berapa kali melaksanakan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas pasca pemilu atau 1 tahun terakhir?

Rani: Pendidikan pemilih itu berlangsung sepanjang masa. Ada tahapan pemilu dan ada masa pasca pemilu atau post election. Nah khusus di Yogyakarta, pendidikan pemilih pada kelompok disabilitas tidak hanya dilakukan KPU sendiri. KPU menggandeng organisasi disabilitas dan membuat roadmap partisipasi disabilitas. Roadmap itu dikerjakan bersama organisasi disabilitas seperti SAPDA, SIGAB, dan lainnya. Total ada sebelas lembaga yang terlibat. Tujuannya agar partisipasi disabilitas itu tidak hanya pada hari-H pemilu saja, tetapi mereka juga tahu kenapa harus memilih, alasan menggunakan hak pilih, dan memahami proses demokrasi.

Waila: pelaksanaannya kemaren dalam bentuk workshop itu buka bu? Atau ada kegiatan lainnya pendidikan pemilih?

Rani: iya iya betul, jadi kita melakukannya sebenernya bertahap, workshop pertama itu memetakan apa yang mau dubahas berdasarkan keresahan mereka. Kalau workshop kedua itu teman-teman sudah mulai membahas solusi. Jadi bukan lagi mencari masalahnya apa, tetapi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Masing-masing kelompok memberikan usulan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan yang mereka hadapi selama pemilu. Lalu yang ketiga itu kami sudah pemaparan solusi yang sudah disusun sebelumnya, itu dalam bentuk roadmap dibantu sigab yang menyusun.

Waila: Berarti rangkaiannya memang bertahap gitu yah bu, sebelum kagiatan workshop tersebut apakah ada rangkaian kegiatan lainnya yang dilakukan KPU?

Rani: Oh kalo itu pasti ada, kalo secara tidak formal kami diawal tahun lalu itu mengadakan ngumpul bareng para disabilitas, waktu itu acaranya ngasah roso yah betul yah mbak (memastikan kepada yang mendampingi). Sebenarnya kan itu sebagai forum silaturahmi sekaligus diskusi demokrasi di indonesia bersama dengan disabilitas SIGAB, SAPDA dan Lkis.

Waila: Tapi bu apakah kegiatan tersebut termasuk dalam rangkaian pendidikan pemilih yang tahun ke tahun KPU lakukan?

Rani: secara tidak langsung iyah betul, hal tersebut bentuk upaya kami karena kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi yah kami merancang bagaimana isu – isu terkait demokrasi bisa kami sampaikan melalui forum-forum seperti itu.

Waila: untuk target pesertanya itu semua bentuk penyandang disabilitas yah bu?

Rani: Semua. Tidak boleh dibedakan. Meskipun kami kamaren hanya beberapa disabilitas yah. Karena juga masing-masing ragam disabilitas punya kebutuhan dan hambatan yang berbeda. Itu yang membuat KPU juga harus belajar. Salah satu evaluasi selama ini adalah masih rendahnya perspektif penyelenggara pemilu terhadap disabilitas. Maka di masa post election ini kami belajar memahami dan melayani disabilitas bersama organisasi-organisasi tadi. Misalnya diajari cara menuntun netra, cara berbicara dengan teman rungu, dan sebagainya. Itu semua proses agar nanti ketika tahapan pemilu dimulai, penyelenggara sudah siap.

Waila: Kalau materinya sendiri bagaimana?

Rani: Kalau masa post election, materinya berbeda dengan masa tahapan pemilu. Kalau masa tahapan, materinya peserta pemilu, cara menggunakan hak pilih, cara berpartisipasi dalam kampanye, dan sebagainya. Kalau post election, materinya seperti pengertian demokrasi, kenapa harus menggunakan hak pilih, bagaimana menjadi warga negara yang baik, dan sebagainya.

Waila: Bagaimana cara memastikan materi yang disampaikan benar-benar sampai?

Rani: Nah itu yang selama ini belum pernah diukur secara maksimal oleh KPU. Selama ini kita hanya melihat hasilnya saja, misalnya dari angka partisipasi pemilih. Karena itu di roadmap partisipasi disabilitas dibuat evaluasi per tahun untuk memastikan apakah kerja-kerja KPU benar-benar sampai dan berpengaruh terhadap pemahaman demokrasi dan kesadaran menggunakan hak pilih. Hambatan berinteraksi dengan teman disabilitas itu kompleks. Bahkan dalam proses pendataan saja ada keluarga yang belum mau anggota keluarganya didata, ada yang belum dibuatkan KTP, bahkan ada yang disembunyikan karena malu. Maka pendekatan tidak hanya ke penyandang disabilitas, tetapi juga ke keluarga dan pendamping.

Waila: Pendekatan kepada keluarga itu bagaimana cara melakukannya bu?

Rani: Kami datangi ke kediamannya, kami membuat kunjungan dan menanyakan hal-hal yang mereka butuhkan. Kemudian kami juga memberikan pemahaman bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pemilu, termasuk hak untuk didata sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya. Karena kalau keluarga sudah memahami pentingnya hak politik penyandang disabilitas, biasanya mereka akan lebih mendukung ketika ada kegiatan sosialisasi ataupun saat proses pemilu berlangsung.

Waila: Kalau pendidikan pemilih itu ada rekrutmen relawan?

Rani: Pada Pemilu 2014 ada Relawan Demokrasi. Di dalamnya ada segmen khusus disabilitas. Teman-teman disabilitas bertugas melakukan sosialisasi kepada komunitas disabilitas lainnya. Tetapi pada Pemilu 2024 kebijakan itu tidak ada secara nasional. Kalau pun ada di daerah, tergantung desain anggaran masing-masing daerah.

Waila: Berarti bentuk kerelawanannya seperti apa?

Rani: Materi sosialisasi dari KPU diberikan kepada mereka, lalu mereka turun langsung ke komunitas-komunitas menjadi relawan dan memberi informasi. Karena pendekatan terbaik memang sesama teman disabilitas. Banyak teman disabilitas merasa orang non-disabilitas tidak memahami apa yang mereka rasakan.

Waila: Kalau terkait kebutuhan khusus penyandang disabilitas bagaimana?

Rani: KPU sudah mulai memetakan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas. Misalnya untuk netra harus ada suara dan braille. Untuk rungu harus ada juru bahasa isyarat. Kalau disabilitas fisik berarti memastikan tempatnya aksesibel. Masing-masing ragam punya kebutuhan dan hambatan yang berbeda.

Waila: Berarti KPU sudah memastikan semua sesuai kebutuhan mereka?

Rani: Iya, meskipun masih dalam skala umum dan belum terlalu spesifik. Misalnya TPS harus aksesibel. Karena yang membutuhkan aksesibilitas bukan hanya disabilitas, tetapi juga lansia dan kelompok rentan lainnya.

Waila: Kalau dalam pendidikan pemilih, media atau metode apa yang digunakan?

Rani: Tatap muka dan juga media digital. Website KPU juga diupayakan bisa diakses teman-teman disabilitas, .

Waila: Upaya yang seperti apa yang dilakukan KPU agar media tersebut teman-teman disabilitas mudah akses?

Rani: Semisal untuk teman rungu, biasanya informasi visual atau video diusahakan ada teks atau penjelasannya. Selain itu, kami juga tetap mengombinasikan informasi dengan metode tatap muka. Karena tidak semua teman disabilitas nyaman atau mudah mengakses media digital. Jadi pendekatannya tidak hanya satu cara saja. Kami juga sering meminta masukan dari organisasi disabilitas terkait apakah media yang kami gunakan sudah cukup aksesibel atau belum. Karena kebutuhan setiap ragam disabilitas itu berbeda-beda.

Waila: Apakah KPU bekerja sama dengan LSM atau organisasi lain?

Rani: Iya. Dengan organisasi disabilitas seperti SIGAB, SAPDA, YAKKUM, dan juga pemerintah daerah seperti Kesbangpol. Bentuk kerja samanya misalnya sosialisasi bersama. Kesbangpol menyediakan kegiatan, KPU menjadi narasumber.

Waila: Apakah pendidikan pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan?

Rani: Iya, harus berkelanjutan. Makanya ada roadmap partisipasi disabilitas untuk memastikan semuanya berjalan terus.

Waila: Bagaimana upaya KPU DIY agar program itu tetap berjalan?

Rani: Kami melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota karena KPU itu hierarkis. Mereka melaporkan kegiatan kepada kami, lalu kami evaluasi. Kalau ada titik yang belum dijangkau oleh KPU kabupaten/kota, nanti KPU DIY yang mengisi.

Waila: Kalau roadmap partisipasi disabilitas itu berarti sudah jadi dokumen yah Bu?

Rani: Sudah. Namanya roadmap partisipasi disabilitas. Sekarang kami sedang menurunkan isi roadmap itu menjadi SOP dan langkah-langkah teknis agar nanti saat tahapan Pemilu 2029 dimulai semuanya sudah siap.

B. WAWANCARA INFORMAN 2

Hari, Tanggal: Senin, 26 Mei 2026

Informasi Informan

Nama : Dita

Jabatan : Penata Pemilu Ahli Pertama

Lama Bekerja : 16 Tahun

Peran Dalam Program

Pendidikan Pemilih : Fasilitator

Waila: Selamat siang Mbak, sebelumnya terima kasih atass waktunya. Disini aku ingin melakukan wawancara terkait pendidikan pemilih yang dilakukan KPU DIY kepada penyandang disabilitas. Mungkin bisa memperkenalkan diri sendiri dulu. Nama, terus jabatan, lama bekerja, sama peran di dalam pelaksanaan pendidikan pemilih.

Dita: Okeh, saya Dita dan sudah 16 tahun bekerja di KPU. Untuk di KPU DIY itu berarti sudah tahun ke-11. Saya staf pelaksana di Divisi Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU DIY. Peran dalam pelaksanaan itu di KPU DIY sendiri mulai menangani pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat itu dari tahun 2015. Kemudian sempat dipindahkan ke bagian lain, kemudian kembali lagi ke bagian yang menangani sosdiklih dan parmas itu di tahun 2023. Dan untuk yang dilakukan itu adalah fasilitasi seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang direncanakan maupun yang ditetapkan kepada seluruh segmen pemilih.

Waila: Jadi dari perencanaan itu Mbak Dita juga ikut serta menyusun perencanaan itu?

Dita: Kalau untuk perencanaan, ikut secara langsung menentukan itu enggak. Kita hanya sifatnya memfasilitasi saja. Misalkan dari pimpinan menghendaki kegiatan yang dilakukan atau disasar ke beberapa segmen pemilih, itu kita kondisikan.

Waila: Kalau dari pendidikan pemilih, periode itu setiap selesai pemilu misalnya tahun 2024 atau ada periodenya gitu?

Dita: Kalau sosialisasi dan pendidikan pemilih itu tidak bergantung ke periode pemilu ya. Jadi karena itu sesuatu hal yang terus berlanjut. Salah satu pekerjaan yang kami lakukan pasca pemilu itu salah satunya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi enggak bergantung pada tahapan pemilu. Ketika pemilu sudah selesai pun itu tetap dilakukan untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih itu sendiri.

Waila: Kalau ketika mau melaksanakan itu ada pendataan disabilitas juga jenis-jenisnya?

Dita: Kalau untuk disabilitas ini kan dalam data pemilih itu sudah ada beberapa kategori disabilitas. Ini untuk segmen salah satu segmen dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih itu memang segmen disabilitas. Nah ini mencakup semuanya. Jadi ketika kami melakukan sosdiklih ke segmen disabilitas itu mencakup semua jenis disabilitas.

Waila: Kalau saya baca di panduan pendidikan pemilih tahun 2015, pendidikan pemilih itu kan berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi dan juga kepemiluan. Itu nilai-nilai demokrasi seperti apa yang disampaikan?

Dita: Kalau untuk sosdiklih yang dilakukan itu pertama kita mengenalkan demokrasi itu apa sih, kemudian pentingnya demokrasi bagi kehidupan masyarakat itu apa sih, kenapa harus ada demokrasi, kemudian juga implementasinya seperti apa. Nah dengan pemilu tentu saja, pemilu itu kan sarana berdemokrasi masyarakat. Jadi kita kaitkan ke situ. Nah dari penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu tentu saja output yang diinginkan itu ketika masyarakat semakin paham mengenai nilai-nilai demokrasi, kemudian juga paham pentingnya pemilu bagi kehidupan, kemudian aware atau peduli terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas, dan juga berpartisipasi dalam pemilu tentu saja. Untuk tahapan itu kan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kita lakukan disesuaikan dengan tahapan. Misalkan tahapannya sedang tahapan DPT, kemudian tahapan kampanye atau tahapan pemungutan dan penghitungan suara, itu disesuaikan dengan tahapannya. Tapi tentu saja dalam sosdiklih yang dilakukan itu selalu ada penekanan terhadap nilai-nilai demokrasi dan juga pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Waila: Tadi mbak dita mengatakan kalo penddidikan pemilih untuk mereka semakin paham nilai-nilai demokrasi dan sebagainya. Nah, dari KPU ada proses untuk mengukur mereka sudah paham atau belum?

Dita: Oh enggak sih. Kalau untuk sosdiklih yang kita lakukan itu enggak. Beberapa saja yang ada post-test atau pre-test, itu biasanya untuk sasarannya seperti mahasiswa. Memang istilahnya gadget friendly ya. Segmen pemilih yang lain itu kami tidak menerapkan post-test maupun pre-test seperti itu. Pernah sewaktu Pemilu 2024 itu juga kita terapkan pre-test dan post-test waktu pemutaran film Kejarlah Janji. Itu di pondok pesantren, sekolah, dan kampus ada pre-test dan post-test juga.

Waila: Kalau terkit materi kepemiluan yang disampaikan itu seperti apa?

Dita: Kepemiluan di sini tentu saja berkaitan dengan pemilu itu sendiri ya. Mengenai undang-undang pemilu, asas pemilu itu apa, kemudian penyelenggara pemilu itu siapa, kemudian apa sih yang dipilih ketika pemilu. Jadi berkaitan tentang pemilu itu sendiri termasuk tahapan-tahapan yang ada dalam pemilu. Kita ambil yang berkaitan di situ tentang politik uang sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat bahwa kalau pemilu yang berkualitas itu tentu saja dengan tidak menormalisasi politik uang.

Waila: Oiyaa, lalu apakah pendidikan pemilih yang dilakukan ini mendorong partisipasi penyandang disabilitas?

Dita: Ini salah satu upaya KPU DIY untuk meningkatkan partisipasi dari disabilitas itu sendiri sebagai salah satu segmen pemilih. Kalau dilihat secara angka barangkali ada kenaikan yang lumayan.

Waila: Bentuk partisipasi dari penyandang disabilitas yang diharapkan KPU itu seperti apa?

Dita: Kalau yang diharapkan tentu saja bisa menularkan juga mengenai demokrasi dan kepemiluan itu sendiri kepada relasi, saudara, atau kerabat. Tapi tentu saja ending-nya itu di peningkatan partisipasi juga. Bagaimana disabilitas itu bisa memberikan saran dan masukan kepada kami untuk bagaimana pelaksanaan pemilu yang betul-betul aksesibel yang diharapkan oleh penyandang disabilitas. Dari sosdiklih yang kita lakukan itu juga berusaha menggali feedback.

Waila: Biasanya secara umum KPU memberikan informasi seperti apa ke penyandang disabilitas?

Dita: Untuk sosdiklihnya sendiri tentu saja ada tentang demokrasinya, ada tentang pemilunya, kemudian nanti ketika di TPS itu apa yang harus dilakukan. Ini sewaktu tahapan pemilu ya. Nanti sewaktu di TPS itu apakah boleh ada pendamping atau tidak, kemudian TPS yang aksesibel itu seperti apa, kita sampaikan di situ.

Waila: Lalu juga apakah pendidikan pemilih itu meningkatkan literasi politik mereka?

Dita: Kita harapkan jangka panjangnya meningkatkan literasi politik ya. Itu kan salah satu bagian dari keberlanjutan. Maksudnya tidak hanya di satu titik kemudian berhenti, tapi kita lakukan terus menerus. Itu juga sebagai salah satu alasan adanya roadmap disabilitas di Pemilu 2029. Ini juga menjadi bagian dari upaya KPU DIY untuk terus meningkatkan literasi politik dari para penyandang disabilitas.

Waila: Kalau misalnya pemilu dan proses sosialisasi atau pendidikan pemilih itu ada recruitment relawan untuk penyandang disabilitas?

Dita: Kalau untuk yang 2024 kemarin kebetulan belum ada ya. Kalau untuk 2029 belum tahu, tapi barangkali bisa jadi salah satu kemungkinan.

Waila: Tapi sebelumnya pernah ada?

Dita: Relawan Demokrasi itu pernah ada di Pemilu 2014 dan 2019 kalau saya enggak salah. Itu ada namanya Relawan Demokrasi untuk membantu KPU dalam melaksanakan sosdiklih juga.

Waila: Bentuk kerelawanan penyandang disabilitas pada waktu itu seperti apa?

Dita: Ada yang berpartisipasi juga sebagai Relawan Demokrasi waktu itu. Mereka juga sama antusiasnya dengan teman-teman yang lain untuk turut menyukseskan pemilu itu sendiri.

Waila: Kalau dalam pelaksanaan sosdiklih itu ada pengelompokan sesuai jenis disabilitas?

Dita: Kalau dalam sosdiklih itu tentu saja langsung semuanya. Kita menggandeng organisasi disabilitas yang di dalamnya ada beberapa jenis disabilitas sehingga bisa langsung ter-cover.

Waila: Dengan adanya kerja sama dengan SIGAB atau SAPDA itu apa yang dilakukan KPU?

Dita: Dengan adanya kerja sama dengan SIGAB atau SAPDA itu kita berusaha mengetahui apa sih yang dibutuhkan. Kemudian dalam setiap sosdiklih juga kita selalu tanyakan isu-isu penting yang sekiranya berpengaruh dan bisa membantu mereka agar pemilu itu lebih aksesibel lagi untuk teman-teman disabilitas.

Waila: Biasanya kebutuhan utama mereka itu apa?

Dita: Tentu saja di TPS ya. Mereka membutuhkan TPS yang ramah disabilitas. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu juga dari KPU RI senantiasa menekankan TPS yang ramah disabilitas. Misalnya dalam pemilihan bangunan TPS, akses jalan landai, alat bantu mencoblos atau template, itu termasuk bagian perlengkapan TPS.

Waila: Kalau dalam pendidikan pemilih, kebutuhan utama mereka bagaimana?

Dta: Kalau dalam sosdiklih itu kita tidak memandang jenis disabilitasnya. Jadi memang langsung semuanya kita berikan mengenai sosdiklih ini sendiri. Tidak dipisah-pisahkan sesuai jenisnya.

Waila: Bagaimana cara KPU memastikan semuanya mendapatkan kebutuhan mereka?

Dita: Itu tadi, karena kita ada kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas. Dari situ kemudian kita rumuskan apa yang dibutuhkan. Kita evaluasi juga dari pengalaman pemilu sebelumnya, apa yang bisa direkomendasikan.

Waila: Kalau penyandang disabilitas tentu butuh pendekatan khusus agar penyampaiannya benar-benar tersampaikan. Media atau metode seperti apa yang dilakukan KPU?

Dita: Kita biasanya tatap muka ya. Kalau memang ingin memastikan semua bisa tersampaikan dan kita mendapatkan feedback, ya melalui tatap muka.

Waila: Selain tatap muka ada lagi?

Dita: Enggak sih, hanya tatap muka itu sendiri.

Waila: Berarti tadi ada kerja sama dengan organisasi juga. Selain itu ada kerja sama dengan lembaga lain?

Dita: Tentu saja kita juga kadang menjadi narasumber ketika ada lembaga-lembaga yang concern dengan disabilitas. Misalnya Kesbangpol punya acara kemudian mengundang kita sebagai narasumber yang pesertanya disabilitas, kita support di situ. Kemudian ada lembaga-lembaga lain atau perkumpulan lain yang concern di situ, itu kita support juga. Jadi kita tidak tertutup. Kita terbuka untuk semua kegiatan yang di dalamnya ada kesempatan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Waila: Biasanya dari lembaga mana yang sering bekerja sama?

Dita: Yang sering itu Kesbangpol DIY, kemudian OHANA, SIGAB, SAPDA. Kadang juga dari universitas. Kalau dengan Kesbangpol hanya menjadi narasumber. Kalau dengan SIGAB itu kita ada penyusunan roadmap disabilitas untuk Pemilu 2029.

Waila: Apakah KPU melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan?

Dita: Ada jadwal kegiatannya tentu saja. Kayak kemarin ada sosdiklih dengan segmennya kelompok lansia. Untuk jadwalnya ada, tetapi tidak saklek dan bisa fleksibel.

Waila: Upaya KPU agar kegiatan ini tetap berjalan bagaimana?

Dita: Tentu saja dengan menjalin kerja sama dengan instansi-instansi lain, baik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, maupun dinas-dinas yang menaungi segmen pemilih tersebut.

C. WAWANCARA INFORMAN 3

Hari, Tanggal: Senin, 26 Mei 2026

Informasi Informan

Nama : Fitri Hartati

Jabatan : Penata Pemilu Ahli Pertama

Lama Bekerja : 8 Tahun

Peran Dalam Program

Pendidikan Pemilih : Fasilitator Administrasi

Waila: Perkenalkan, nama saya Waila Sofia. Saya dari Prodi Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait skripsi saya tentang pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada pemilih disabilitas. Mungkin bisa perkenalkan nama, jabatan, lama bekerja, serta peran dalam program pendidikan pemilih.

Fitri: Nama saya Fitri Hartati. Jabatan sebagai analis. Lama bekerja sejak 2018. Saya awalnya di Jawa Tengah, kemudian pindah ke DIY sekitar satu tahun yang lalu.

Waila: Perannya dalam pelaksanaan pendidikan pemilih seperti apa?

Fitri: Kami lebih membantu memfasilitasi administrasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Jadi kami mendukung dan memfasilitasi segala kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan program.

Waila: Terkait pemilih disabilitas, apakah datanya ada di KPU?

Fitri: Kalau penyandang disabilitas itu ada di DPT. Tapi perlu dibedakan, apakah yang dimaksud penyandang disabilitas atau pemilih disabilitas. Itu dua hal yang berbeda. Kalau penyandang disabilitas belum tentu terdaftar sebagai pemilih. Misalnya masih di bawah umur. Kalau pemilih disabilitas, berarti sudah terdaftar di KPU. Lebih spesifik lagi, kalau kita bicara penyandang disabilitas itu seperti "kue besar". Dari situ ada sebagian yang menjadi pemilih, lalu dari pemilih itu ada lagi yang terpapar langsung oleh sosialisasi KPU. Berarti yang saya soroti adalah yang terpapar langsung?

Waila: Iya, yang ikut kegiatan tatap muka.

Fitri: Itu bisa dilihat dari daftar hadir. Pemilih disabilitas ada di DPT. Tapi yang mendapatkan sosialisasi langsung belum tentu semuanya tercatat di daftar hadir, karena sistemnya berjenjang. Biasanya kegiatan seperti workshop dilakukan beberapa kali, misalnya tiga kali dalam setahun. Peserta di masing-masing kegiatan ada, tapi harus dikompilasi supaya tidak ganda. Setiap tahun ada perbedaan fokus. Misalnya mendekati pemilu fokusnya pada pelayanan. Hasil evaluasi menunjukkan

partisipasi pemilih disabilitas menurun di 2024, salah satu penyebabnya karena pelayanan di TPS kurang ramah disabilitas. Ke depan, fokusnya adalah pembekalan bagi KPPS agar lebih ramah disabilitas. Perencanaan ada di roadmap. Tapi tidak mencantumkan jumlah peserta karena berkaitan dengan anggaran.

Waila: Terkait nilai demokrasi, apa yang disampaikan kepada pemilih disabilitas?

Fitri: Materinya sama dengan masyarakat umum, seperti: Hak dan kewajiban Pentingnya menggunakan hak pilih. Yang berbeda adalah cara penyampaiannya, misalnya menggunakan bahasa isyarat.

Waila: Berarti semua kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan untuk semuanya?

Fitri: Ya, semua mengacu pada regulasi, termasuk PKPU. Di situ diatur sasaran, metode, materi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih.

Waila: Bagaimana dengan partisipasi pemilih disabilitas?

Fitri: Harapannya mereka menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab, serta ikut mengawasi proses pemilu.

Waila: Apakah ada pemetaan kebutuhan disabilitas?

Fitri: Ada di roadmap. Misalnya kebutuhan tunarungu berbeda dengan tunanetra. Namun pelaksanaannya tergantung anggaran. Misalnya untuk braille atau juru bahasa isyarat tidak selalu tersedia. Sekarang lebih banyak menggunakan media digital. Kalau mencetak media seperti braille membutuhkan biaya besar.

Waila: Metode yang digunakan lebih banyak tatap muka atau media?

Fitri: Sekarang lebih banyak ke media sosial. Tatap muka tetap ada, tapi terbatas. Kadang kegiatan juga dicampur dengan segmen lain karena keterbatasan anggaran.

Waila: Apakah ada kerja sama dengan pihak lain?

Fitri: Ada. Dengan organisasi disabilitas seperti SIGAP dan lainnya.

Ada yang formal (MoU), ada juga yang tidak formal. Kerja sama dilakukan untuk membantu penyebaran informasi ke komunitas.

Waila: Apakah pendidikan pemilih dilakukan setiap tahun?

Fitri: Ya, dilakukan sepanjang tahun. KPU memiliki rencana kerja, misalnya per tiga bulan.

Waila; Upaya agar program tetap berjalan seperti apa?

Fitri: Tetap dilaksanakan, meskipun ada keterbatasan anggaran. Kalau tidak bisa tatap muka, dialihkan ke media digital. Kadang program yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan semua karena efisiensi anggaran, jadi disesuaikan. Yang penting program tetap berjalan, meskipun dengan metode yang berbeda.

D. WAWANCARA INFORMAN 4

Hari, Tanggal: Senin, 26 Mei 2026

Informasi Informan

Nama : Clara

Jabatan : Penata Pemilu Ahli Pertama

Lama Bekerja : 5 Tahun

Peran Dalam Program

Pendidikan Pemilih : Fasilitator pendukung

Waila: Halo Mbak, perkenalkan saya Sofia, saya sedang melakukan penelitian terkait bagaimana KPU DIY melakukan penddikan pemilih kepada penyandang disabilitas. Mungkin bisa memperkenalkan nama, jabatan, lama bekerja, serta peran dalam pendidikan pemilih.

Clara: Nama saya Clara. Saat ini saya bekerja sebagai analis di KPU DIY. Untuk pengalaman kerja, saya termasuk baru bergabung yah itu sekitar 5tahunan. Namun sebelumnya saya sempat ditempatkan di daerah lain, kemudian baru dipindahkan ke KPU DIY sekitar satu tahun terakhir. Kalau untuk peran dalam pendidikan pemilih, posisi saya lebih banyak berada di bagian teknis pendukung, khususnya dalam administrasi dan fasilitasi kegiatan. Jadi saya membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dirancang oleh divisi terkait dapat berjalan dengan baik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan kegiatan.

Waila: Berarti Mbak Clara tidak terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan program?

Clara: Untuk penyusunan perencanaan secara langsung, itu biasanya dilakukan oleh pimpinan atau komisioner. Kami di bagian staf lebih berperan dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Misalnya ketika sudah ditentukan bahwa akan ada kegiatan sosialisasi untuk segmen tertentu, termasuk penyandang disabilitas, kami membantu menyiapkan kebutuhan administrasi, koordinasi dengan pihak terkait, serta memastikan kegiatan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan rencana.

Waila: Terkait dengan pemilih disabilitas, bagaimana pendataan yang dilakukan oleh KPU?

Clara: Pemilih disabilitas itu sebenarnya sudah terdata di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tetapi memang perlu dibedakan antara penyandang disabilitas secara umum dengan pemilih disabilitas. Kalau penyandang disabilitas itu cakupannya lebih luas, karena tidak semua penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih, misalnya karena faktor usia atau belum memenuhi syarat. Sedangkan yang kami tangani di KPU adalah yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Jadi

ketika kita bicara pemilih disabilitas dalam konteks pendidikan pemilih, itu berarti fokusnya pada mereka yang sudah memiliki hak pilih.

Waila: Apakah semua pemilih disabilitas mendapatkan sosialisasi secara langsung dari KPU?

Clara: Kalau secara prinsip yaa semua pemilih disabilitas menjadi sasaran pendidikan pemilih. Tapi dalam realisasinya kan tidak semuanya sesuai dengan rencana, nah jadi mereka mendapatkan sosialisasi secara langsung dalam bentuk tatap muka. Hal ini karena sistem yang digunakan lebih bersifat berjenjang. KPU biasanya memberikan sosialisasi kepada perwakilan komunitas atau organisasi disabilitas. Kemudian dari perwakilan tersebut, informasi diteruskan kembali ke anggota komunitasnya masing-masing. Jadi memang ada keterbatasan dalam jangkauan langsung, tetapi diharapkan informasi tetap bisa menyebar secara luas melalui jaringan tersebut.

Waila: KPU DIY tahun 2025 kemaren sudah berapa kali mengadakan pendidikan pemilih ke teman-teman difabel mbak?

Clara: Yang pertama itu kita mengadakan bersama tiga organisasi sekaligus, itu ada Lkis, SAPDA sama SIGAB. Cuman yah acaranya itu dibungkus dengan acara ngasah roso, karena kan kita tau lagi-lagi karena anggaran. Cuman kita berusaha menyelipkan sedikit tentang pendidikan pemilih di acara-acara kayak gitu. Sama setelah itu kita ada penyusunan roadmap bersama SIGAB. Nanti bisa lihat di dokumen yang sudah disusun saja kalo kegiatannya gimana

Waila: Tapi sebenernya pendidikan pemilih itu bagaimana sih mbak perencanaannya, apakah memang sengaja diselipkan pada acara tertentu atau memang ada jadwal khususnya gitu?

Clara: Sebenernya semuanya terencanakan, tapi karena anggaran, kita hanya berusaha semuanya tetap berjalan. Kalau perencanaan pendidikan pemilih, termasuk untuk penyandang disabilitas, sudah tertuang dalam dokumen. Di dalam dokumen tersebut sudah dijelaskan rencana kegiatan per tahun, termasuk fokus yang ingin dicapai. Setiap tahun itu biasanya memiliki fokus yang berbeda, tergantung pada kondisi dan kebutuhan. Misalnya, pada tahun mendekati pemilu, fokusnya lebih ke teknis penggunaan hak pilih dan informasi tahapan pemilu. Sedangkan di masa pasca pemilu, lebih ke penguatan pemahaman demokrasi dan peningkatan kesadaran politik. Jadi dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program.

Waila: materinya biasanya apa ajah yang disampaikan dalam pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas?

Clara: Untuk materi, sebenarnya semua sama saja tidak ada yang dibedakan dengan yang disampaikan kepada masyarakat umum. Cuman mungkin ada indikator-indikator yang di tampung sesuai kebutuhan mereka, seperti disabilitas ini hambatannya dalam proses pemilihan sih lebih banyak kita kumpulkan.

Waila: Berarti yang membedakan lebih ke metode penyampaiannya ya?

Clara: Betul. Jadi bukan materinya yang dibedakan, tetapi cara penyampaiannya. Misalnya untuk teman-teman tunarungu, kita menggunakan bahasa isyarat atau media visual. Untuk tunanetra, bisa menggunakan audio atau media yang lebih ramah akses. Selain itu, sekarang juga banyak memanfaatkan media digital seperti media sosial untuk menjangkau lebih banyak audiens. Jadi pendekatannya lebih ke bagaimana informasi tersebut bisa benar-benar diterima oleh mereka.

Waila: Berarti tadi ada pemetaan kebutuhan khusus untuk setiap jenis disabilitas?

Clara: Iyah betul, Pemetaan kebutuhan itu juga sudah masuk dalam roadmap. Karena setiap jenis disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan, kami berusaha menyesuaikan metode dan media yang digunakan agar lebih inklusif. Meskipun tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi secara maksimal.

Waila: Apa kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan pemilih untuk penyandang disabilitas?

Clara: Kendala yang paling utama adalah keterbatasan anggaran. Karena untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya untuk menyediakan juru bahasa isyarat, mencetak media dalam bentuk braille, atau membuat fasilitas yang benar-benar ramah disabilitas. Selain itu, jangkauan juga menjadi kendala, karena tidak semua pemilih disabilitas bisa dijangkau secara langsung.

Waila: Lalu bagaimana upaya KPU agar program pendidikan pemilih ini tetap berjalan?

Clara: Upayanya adalah dengan tetap melaksanakan program meskipun dengan keterbatasan yang ada. Kalau misalnya kegiatan tidak bisa dilakukan secara tatap muka karena keterbatasan anggaran atau kondisi tertentu, maka dialihkan ke media digital. Yang terpenting adalah program tetap berjalan dan tujuan dari pendidikan pemilih tetap tercapai, meskipun metode yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Waila: Apakah KPU bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan pemilih ini?

Clara: Iya, tentu saja. KPU tidak bisa bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama organisasi penyandang disabilitas dan komunitas. Ada kerja sama yang bersifat formal melalui perjanjian kerja sama, dan ada juga yang bersifat non-formal. Kerja sama ini penting untuk membantu menyebarkan informasi dan menjangkau lebih banyak pemilih disabilitas.

E. WAWANCARA INFORMAN 5

Hari, Tanggal: Senin, 4 Juni 2026

Informasi Informan

Nama : Ajiwan

Jabatan : Staf Media SIGAB Indonesia

Peran Dalam Program

Pendidikan Pemilih : Peserta Pendidikan pemilih

Waila: Selamat siang bapak, sebelumnya perkenalkan saya waila prodi sosiologi atma jaya yogyakarta…saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait dengan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU DIY kepada teman-teman difabel. Mungkin bisa memperkenakan diri pak, nama, jabatan

Ajiwan: Perkenalkan nama saya Ajiwan Debebradi, saya dari Secret Indonesia, Sasana Inklusi dan Gerakan Avokasi Difabel di bagian staf media. Kebetulan isu demokrasi itu biasanya yang ditugaskan kalau enggak mbak Nini saya.

Waila: seperti kemarin juga yang katanya ada kayak ngasaroso gitu itu ikut juga apa? Dan apakah itu juga rancangan atau rangkaian dari pendidikan memilih itu?

Ajiwan: sepertinya nggak sih kalo rangkaian yah, cuma mereka mau ngadain penjangkauan ke beberapa komunitas melalui beda buku.

Waila: berarti cuman acara ngasah rosoh dengan beda buku yah pak bukan pendidikan pemilih, terus bagaimana pak awal KPU menghubungi atau mengajak kerja sama dengan pihak sigab untuk melakukan kegiatan pendikan pemilih.

Ajiwan: Kalau KPU itu sudah lama ya, banyak kalau konteksnya KPU DIY, apalagi KPU Kota, apalagi Mbak Rani di KPU DIY itu kan sudah sebelum saya disigab juga memang kerja sama seperti itu. Dari tahun ke tahun, dari setiap pemilu, nggak tahu mungkin pemilu 2009, 2014, 2019, bahkan 2024 kemarin memang kami senantiasa bersinergi untuk upaya pemilu yang lebih inklusif seperti itu.

Waila: Untuk kerjasamanya itu memang untuk hanya pendidikan pemilih aja atau ada hal lain pak?

Ajiwan: Macem-macem. Macem-macem. Intinya untuk pemilih yang inklusif gitu. Bisa macam-macem, dalam ranah pendidikan politik, bisa juga mereka misalkan minta masukkan ke kita untuk, ya dalam berbagai hal ya, dalam beberapa kegiatan kan mereka selalu mengundang kita, termasuk bagaimana menyusun SOP. untuk melayani, itu juga melibatkan baik KPU provinsi maupun KPU kota, kemudian kalau di tingkat konteks KPU di kota Kabumpaten juga misalkan bikin video edukasi di Pilkada 2024 untuk bagaimana membangun TPS yang aksesibel, itu. Kemudian juga melibatkan teman-teman difabel dalam sebagai panelis dalam debat publik Pilkada. jadi ranahnya macam-macam jadi nggak hanya cuma apa-apa. Penerima, penerima pendidikan pemilih, tapi juga selalu dilibatkan dalam hal

macam-macam termasuk juga kemarin yang kita lakukan 3 kali itu kan sebenarnya menyusun peta jalan ya bagaimana pemilu ke depan agar lebih inklusif karena pemilu itu kan katanya memang konsepnya inklusif tapi kan beberapa tahun berjalan memang cenderung tidak ada perbaikan secara signifikan dari regulasi maupun implementasinya seperti itu.

Waila: Terus dalam pendidikan pemilih itu kan tadi ada yang disampaikan itudemokrasi dan kemiluhan itu materi yang disampaikan seperti apa terkait dengan demokrasi terus terkait dengan kepemiluhan dari pihak KPU DIY.

Ajiwan: macem-macem, Mbak. Artinya kalau keranahnya KPU kan selalu bahwa angka partisipasi pemilih ya. Angka partisipasi pemilih itu kan dinilai belum optimal Nah ini bagaimana misi mereka agar meningkatkan partisipasi teman-teman difabel ini Biar meningkat agar teman-teman difabel ini gimana caranya untuk bisa datang ke TPS kan gitu Yang selama ini di... Ya di blow up oleh teman-teman KPU kan gitu kan… TPS mereka promosi karena visible dan segala macem kemudian dengan berbagai sarana prasarananya mereka selalu terbicara tidak memungkiri bahwa ada banyak sekali kekurangan tapi mereka tetap mendorong agar kemudian intinya bahwa partisipasi difabel ini agar meningkat seperti itu.

Waila: Kalau pendidikan memilih butuh dengan teman-teman di fabel butuh pendekatan khusus yang mana itu berarti membutuhkan media tambahan msalnya bahasa isyarat itu dari KPU nya atau dari SIGAP misalkan yang menyediakan?

Ajiwan: kalau selama ini dalam KPU, temen-temen KPU selalu menyediakan.

Waila: berarti dari awal itu sudah ada pemataan kebutuhan masing-masing?

Ajiwan: betul, betul bahkan dalam beberapa agenda pun memang mereka menyediakan semua kebutuhan teman-teman difabel, misalkan di debat publik atau di kegiatan-kegiatan yang lain. yang misalkan kayak kemarin di contohnya mungkin bukan di KPU DI tapi di KPU Kabupaten dan Provinsi itu ada penghitungan atau penyerahan surat suara dari tingkat kemantren aku lupa teknisnya suara DTI-nya dari tingkat kemantren ke kota itu mereka ngadain live streaming dan itu ada. jadi bukan hanya kemudian yang ada hubungannya dengan teman-teman difabel tapi juga edukasi-edukasi yang lain atau siaran-siaran informasi yang lain yang di produksi KPU itu biasanya mungkin tidak selalu.

Waila: Semisal, berarti rangkaian apapun itu teman-teman difabel selalu terlibat berpartisipasi?

Ajiwan: biasanya demikian.

Waila: kalau kayak ada, ada namanya itu relawan demokrasi ketika proses pemilu, itu terlibat juga gak pak dalam kerelawanan itu dari tahun ke tahun, apakah tahun ini, khususnya pendidikan pemilih kemaren disampaikan tentang hal itu?

Ajiwan: Kerelawanan demokrasi itu di 2019 itu ada, di 2017 itu ada, di 2019 itu pemilu itu ada, tapi kemudian di 2024 itu hilang. Maksudnya, teman-teman KPU tidak membuka open recruitment lagi kepada teman-teman difabel untuk terlibat sebagai relawan demokrasi. Kalau tahun ini kurang tahu, ketika kemaren menyusun road map tidak disampaikan.

Waila: Itu dari pihak KPU katanya kenapa pak, apakah KPU juga menyampaikan alasan tahun 2024 kenapa tidak ada dan tahun ini juga belum ada kepastian yah pak?

Ajiwan: Nggak ngerti. Mungkin karena biasanya sih karena alasannya karena nggak ada bebicara atau nggak ada regulasi terkaitan itu.

Waila: dalam rangkaian-rangkaian pendidikan pemilih ini, apakah memang kegiatan yang diadakan itu mendorong partisipasi dalam pemilu?

Ajiwan: secara konsep iya, tapi sayangnya memang kalau dari temen-temen di fabelnya ini kan jadi kan gini, polanya kan kalau organisasi difabel sleman ini kan sebenarnya kan banyak mbak tapi mungkin yang dilibatkan dalam pendidikan pemilih ini belum banyak gitu lah, gak sih jadi ragam difabelnya, kemudian orang-orangnya yang kemudian terlibat kemudian juga masifnya teman-teman untuk menggawangkan isu ini itu juga belum maksimal seperti itu. Mungkin juga di sisi lain juga karena ada kenyataan bahwa aksesibilitas di PPS juga belum optimal. Jadi itu masih menjadi PR tersendiri bagi kami teman-teman difabel di Yogyakarta untuk ya gimana kami mau terlibat kalau misalkan TPS-nya misalnya ga akses ya.

Waila: okeh tadi biasanya TPS-nya kurang memadai gitu untuk temen di fabel, selain itu kendalanya biasanya apa saja pak dalam proses pemilu ini?

Ajiwan: Macem-macem, misalnya kendala pekerjaan. artinya kalau konteksnya pilih kadang, ya nggak perlu pilih kadang konteksnya ya pemilu, pemilu itu kan dia bekerja di luar daerah padahal dia terdata sebagai DPP di kota asalnya atau di kabupaten asalnya padahal untuk pulang butuh angkos, kerja nya mungkin gak terus bekerja di sektor formal misalkan, todolan atau lain-lain tapi kan pulang ke desa itu misalnya juga e-fort ya juga Mungkin butuh nge-check, butuh apa dan sebagainya Cuma setengah hari hanya untuk nyeblos itu kayak Menurut mentemen juga kurang worth it gitu. Yang pertama, kemudian yang kedua terkait dengan calon Menurut mereka juga calon-calonnya itu kurang kurang mereka kenal, barangkali, atau kurang repersentatif, mungkin juga temuan sikap juga seperti itu ya. Teman-teman difabel ini merasa bahwa calon-calon yang ada itu tidak mencerminkan kepentingan mereka, tidak paham isu difabel kayak gitu.

Waila: okeh baik pak, kembali lagi ke pendidikan pemilih, kemarin pas pendidikan pemilih itu, Itu kalau saya lihat mungkin secara umum berjalan dengan lancar ya acaranya. Tapi mungkin di internal gitu, ada nggak kendala yang mungkin dihadapi ketika pelaksanaan pendidikan pemilih maupun dalam rarangkain pendidikan pemilih Dari sigab...

Ajiwan: Yang kemarin. Yang Road map. Kalau itu oke sih ya. Maksudnya dia atau acara itu melibatkan perwakilan dari organisasi di FABEL gitu. Pendidikan pemilih ini kan luas ya, enggak cuma kewajiban KPU sebenarnya. Kewajiban misalkan, termasuk partai politik, termasuk Pesbangkol misalnya. Nah untuk konteks partai politik, mereka belum mengambil peran itu kan gitu. Selama ini belum sama sekali belum menjangkaukan. Nah untuk Kesebangpol memang sudah sedikit banyak menjangkau terutama untuk lingkup kota kemarin. Saya kan penduduk kota ya dan kemarin kami sempat Kesebangpol sempat bikin pendidikan pemilih melibatkan teman-teman kota. Persoalannya adalah yang terjadi di tahun ini soal anggaran. Jadi

karena anggaran terbatas mereka tidak bisa melibatkan banyak orang. ini hanya orang-orang pilihan yang mau belajar dan seterusnya padahal teman-teman yang mau belajar yang biasa datang teman-teman yang biasa datang yang sudah tahu teman-teman yang sudah tahu ya gitu lho jadi lagi-lagi soal pemerataan itu soal pemerataan isu soal pemerataan pengetahuan yang mungkin menjadi PR bahkan kemarin yang terjadi yang dilakukan oleh lembaga itu adalah mereka spesifik menyebutkan. Mereka spesifik menyebutkan difabel tertentu yang boleh datang karena awalnya tidak mau menyediakan GBI, tapi akhirnya setelah kami advokasi, mau ya gitu. Ini seperti itu. Tapi penghubungan itu beres sih. Meskipun ya tadi orang-orangnya hanya tertentu saja seperti itu.

Waila: Itu yang menentukan KPU DIY atau dari mana tadi pak, mohon maaf?

Ajiwan: Bukan KPU DIY ya. Ini pelaksana pendidikan pemilih secara global. Kan tadi aku bilang bahwa yang kewajiban, punya kewajiban untuk membuat pendidikan pemilih itu ada paling ke 3 ya, ada KPU, ada kemudian Bawaslu termasuk, Pak KPU Bawaslu, kemudian partai politik termasuk ke sebuah goals nya dari KPU memang tadi untuk mendungkrak jumlah pemilih.

Waila: Iyah betul pak, terus apakah setelah pendidikan pemilih itu ada kelanjutan kegiatan di luar kegiatan formal itu secara informal gitu temen-temen difabel tetap mengkaji apa yang sudah melanjutkan apa yang sudah disampaikan, nisahkan dari kemarin pemilihan bikin peta jalan, peta jalan untuk pemilu 2029.

Ajiwan: Ya tentu ini tetap berlanjut, artinya tetap berlanjut itu kami dari tim SIGAP itu nanti akan melanjutkan itu bikin peta jalannya sehingga nanti harapannya bisa dinaikkan ke KPU pusat, ke KPU nasional dan bisa jadi kemudian jadi benar-benar jadi panduan jadi benar-benar jadi peta jalan agar pemilu di 2029 ini semakin inklusif seperti itu kan selama ini hambatannya adalah pemilu ini di sudah diagendakan, tapi persiapannya biasanya kan ya mepet, beam tech-nya sangat mepet, sangat instan dan lain-lain kan.

Waila: Mungkin kemarin juga kayak menyusun Roadmap itu, itu berarti nanti akan diadakan lagi dengan agenda lain atau itu udah cukup selesai?

Ajiwan: Kalau selesai belum ya, nanti mungkin akan di next step lanjutnya seperti itu.

Waila: Ya mungkin, terakhir ya pak. Ya mungkin dari harapan dari Bapak sendiri itu kayak untuk KPU lah dalam memberikan pandidikan memilih itu gimana?

Ajiwan: Ya harapannya terus berkesinambungan ya. Artinya ini kan proses yang nggak boleh berhenti gitu. Proses yang terus-menerus berjalan. Proses yang ini bagaimanapun berprogres kok gitu. Kita lihat di 2019 sampai dengan 2024 kemarin kan sebenarnya mau gak mau kita bilang ada kemajuan lah meskipun 1, 2 atau berapa pun itu kan tetap ada kemajuan. Tinggal bagaimana salah satunya dengan roadmap ini kan nanti bisa jadi jalan yang agak bisa mempercepat hal itu.

Waila: setiap tahun itu kayak menyusun roadmap itu kayaknya gimana misalnya?

Ajiwan: ini baru kali ini sih kalau roadmap ya kalau tahun-tahun yang lalu itu biasanya kita dilibatkan itu setahun sebelum pemilihan misalnya dari sisi

perencanaan dari sisi penyusunan dapil untuk persiapan pemilu itu. iya untuk persiapan pemilu itu berarti sebenernya nggak ada yang di awal-awal gitu. Terus misalnya kayak sosialisasi untuk apa namanya petugas di lapangan KPPS, PPS, PPK itu juga kita biasanya dilibatkan untuk menjadi narasumber untuk bagaimana sih misalnya berinteraksi dengan teman-teman difabel.

Waila: Tapi, kemarin materinya atau Roadmap-nya itu isinya apa aja pak? Mungkin masih inget.

Ajiwan: Kegiatan per tahun menuju, garis besarnya adalah kegiatan per tahun yang bisa dilakukan menuju pemilu 2029 agar lebih inklusif. itulah kata kuncinya itu kurang lebih ya.

Waila: Itu berarti bentuk penyerapan afirmasi KPU untuk teman-teman difabel.

Ajiwan: pokoknya kegiatan itu kan dibentuk kelompok yah pas pembahasan, nah setiap kelompok itu membahas tema yang berbeda. Kami saling berbagi pengalaman, kemudian mendiskusikan apa yang perlu diperbaiki. Setelah itu hasilnya disampaikan agar bisa menjadi masukan bersama. Nanti hasilnya bisa diminta di KPU pasti ada.

Waila: Baik pak, nanti saya juga tetap komunikasi dengan pihak KPU, terima kasih atas waktunya pak, sudah meluangkan waktunya.

Lampiran 5. LAYOUT PETA JALAN

E-book bisa diakses pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1EB2ZFDpPglK5r7mhSqOcg3uxejw38G1X?usp=sharing



Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Ngasah Roso



Gambar 2. *Workshop* Tahap I



Gambar 3. *Workshop* Tahap II



Gambar 3. *Workshop* Tahap III



Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Wawancaara Bersama Sri Surani



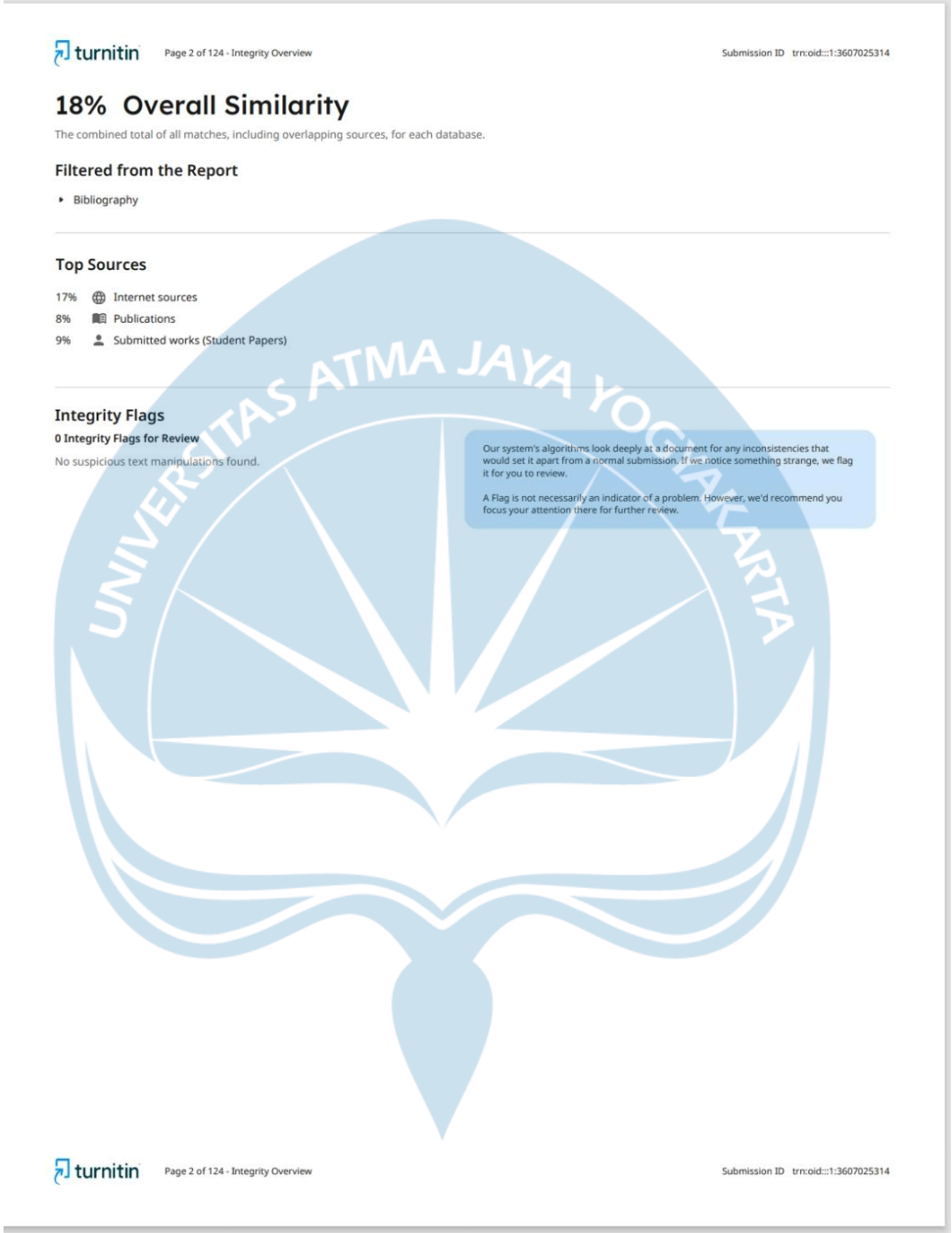
Gambar 2. Wawancaara Bersama Dita



Gambar 3. Wawancaara Bersama Fitri & Clara



Lampiran 8. Hasil Cek Turnitin



turnitin Page 2 of 124 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::1:3607025314

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

17% Internet sources
8% Publications
9% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

turnitin Page 2 of 124 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::1:3607025314